



Praktik Komunikasi Pada Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan Di Daerah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Batam)

Anggi Heru M¹⁾, Emeraldy Chatra²⁾, Ernita Arif³⁾

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

heruanggi29@gmail.com¹⁾

emeraldychatra@soc.unand.ac.id²⁾

ernitaarif@soc.unand.ac.id³⁾

Abstrak

Berdasarkan informasi dari Yayasan Embun Pelangi, LSM yang berfokus pada perlindungan anak di Kota Batam, sebelas anak mendapatkan perlindungan sepanjang 2022 karena kekerasan fisik dan seksual dari teman sekelas dan guru. Penelitian juga menemukan anak-anak berusia lima belas tahun mengalami perundungan dan intoleransi di sekolah, terutama dari etnis minoritas di sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis Praktik Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan paradigma konstruktivisme, menggunakan Teori Kredibilitas Sumber sebagai referensi. Temuan penelitian menunjukkan komitmen dan langkah-langkah strategis Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mengimplementasikan kebijakan nasional pendidikan. Sekolah mengambil langkah konkret, seperti Rapat Project Management Officer (PMO) yang berkelanjutan, keterlibatan aktif dalam bimbingan teknis (bimtek), dan upaya sosialisasi persuasif, mendorong partisipasi pihak terkait untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional. Komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, memainkan peran penting dalam mendukung advokasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Kata kunci: Praktik Komunikasi, Advokasi Kebijakan, Perlindungan Anak di Sekolah

Abstract

Based on information from the Rainbow Dew Foundation, an NGO focusing on child protection in Batam City, eleven children received protection throughout 2022 due to physical and sexual violence from classmates and teachers. The research also found that fifteen-year-old children experienced bullying and intolerance in schools, especially from minority ethnic groups in the school. This study aims to identify, describe, and analyze Communication Practices in the Advocacy of National Education Policy by the Batam City Education Office. This research uses a qualitative method with a case study approach and a constructivist paradigm, using the Source Credibility Theory as a reference. The research findings indicate the commitment and strategic steps of the Batam City Education Office in implementing national education policies. Schools take concrete steps, such as the continuous Project Management Officer (PMO) meetings, active participation in technical guidance (bimtek), and persuasive socialization efforts, encouraging relevant parties to actively implement national education policies. Communication, both verbal and non-verbal, plays a crucial role in supporting education policy advocacy at the school level.

Keywords: Communication Practice, Policy Advocacy, Child Protection in Schools



PENDAHULUAN

Kejadian kekerasan dan perundungan pada anak usia sekolah hampir merata di berbagai wilayah dan lembaga pendidikan, seperti yang terungkap dalam penelitian awal di Kota Batam pada September-November 2022. Berdasarkan data dari Yayasan Embun Pelangi, LSM yang berfokus pada perlindungan anak di Kota Batam, sebelas anak mendapat perlindungan sepanjang tahun 2022 akibat kekerasan fisik dan seksual dari teman sekelas dan guru. Penelitian juga mengungkapkan kasus perundungan dan intoleransi terhadap anak usia lima belas tahun di sekolah, terutama yang berasal dari etnis minoritas di sekolah tersebut.

Analisis data dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Batam menunjukkan dominasi kekerasan seksual dan perilaku intoleran serta perundungan siswa yang mengakibatkan kekerasan fisik dan korban. Keadaan semakin parah dengan ditemukannya anak-anak usia sekolah yang berisiko kehilangan hak belajar karena dipenjarakan sebagai pelaku tindak kriminal. Temuan awal ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan masih menjadi isu yang signifikan di lingkungan sekolah.

Secara konseptual pendidikan dipandang sebagai sebuah sistem sosial, yang saling berinteraksi dan berhubungan dengan aspek lingkungan (Baraldi & Corsi, 2017). Di dalam operasinya, pendidikan sebagai sistem sosial acapkali beradaptasi dengan kondisi lingkungan, dan sebaliknya, aktivitas-aktivitas dalam pendidikan juga kerap memiliki implikasi terhadap lingkungan. Dengan kata lain, dunia pendidikan dipengaruhi oleh kerapatannya dan tuntutan lingkungan, seperti ekonomi, politik, dan budaya (Hoy & Miskel, 2013), yang selanjutnya berdampak pada perubahan arah dan tujuan pendidikan.

Berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di bawah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, terlihat bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Rata-rata, sekolah belum dapat memenuhi delapan standar nasional pendidikan, terutama dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan (guru) serta sarana prasarana. Kondisi ini berpotensi memengaruhi hasil pendidikan. Kinerja siswa dan sekolah menjadi pertimbangan Kemendikbudristek dalam merumuskan kebijakan untuk transformasi dan reformasi pendidikan, seperti Merdeka Belajar. Meskipun Merdeka Belajar mencapai kesuksesan, implementasinya di lapangan, baik di sekolah maupun pemerintah daerah, menghadapi tantangan, dengan tidak semua sekolah dan daerah merespons kebijakan pusat, khususnya terkait program Merdeka Belajar, secara efisien dan responsif.

Hasil studi Indra (2011) menunjukkan bahwa sekolah dan pemerintah daerah cenderung lambat dan kurang responsif dalam mengimplementasikan kebijakan nasional pendidikan. Hal ini disebabkan oleh pemisahan kewenangan dalam urusan pemerintahan pendidikan antara daerah dan sekolah, meskipun keduanya memiliki otonomi dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan nasional pendidikan yang dikeluarkan oleh pusat atau Kemendikbudristek seringkali bersifat sesaat dan temporer, membuat pelaksanaannya sulit di lapangan. Fenomena perubahan kebijakan pendidikan yang terus-menerus diibaratkan sebagai penyakit kronis, menyulitkan semua pemangku kepentingan.

Yuliah (2020) menyoroti kelemahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah dan sekolah, yaitu kurangnya komunikasi antara pusat dan pelaksana di lapangan. Khususnya, kebijakan Merdeka Belajar sebagai kebijakan nasional pendidikan memerlukan komunikasi efektif dan terbuka antara pengambil kebijakan (pusat/Kemendikbudristek) dan pelaksana kebijakan (sekolah/daerah). Solichin (2015) menekankan bahwa komunikasi menjadi penyebab utama keterlambatan implementasi kebijakan nasional pendidikan di daerah dan sekolah, ditambah dengan faktor kebijakan politik dan birokrasi masing-masing daerah. Meskipun advokasi telah dilakukan oleh pengambil kebijakan pusat, Susanto, (2020) menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan nasional di berbagai sektor disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik dan efektif.

Ketidakefektifan komunikasi dalam menangani berbagai permasalahan pendidikan menyebabkan upaya perbaikan menjadi tidak berhasil. Bahkan, setiap kebijakan yang diambil dapat mengakibatkan ketidakselarasan implementasi di lapangan. Hal ini berarti bahwa kebijakan tersebut dapat mengakibatkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah (Hendarman & Pambudi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan komunikasi persuasif untuk mengurangi kesenjangan dan mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Secara keseluruhan, komunikasi efektif menjadi krusial dalam membimbing pelaksana kebijakan untuk merespons setiap kebijakan yang bersifat nasional.

Berdasarkan temuan dari studi dan riset awal yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar berkaitan dengan kurang efektifnya komunikasi. Komunikasi yang tidak berjalan optimal memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun sekolah. Rizky (2015) menekankan pentingnya komunikasi efektif untuk menghindari risiko seperti ketidakmauan, ketidakmampuan, kesalahan, atau

kendala lainnya yang mungkin muncul. Komunikasi efektif dianggap krusial antara pengambil kebijakan, seperti Kemendikbudristek, dengan pelaksana kebijakan, seperti Pemda dan satuan pendidikan.

Dilatarbelakangi persoalan-persoalan di atas, maka dipandang perlu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi dalam advokasi kebijakan nasional pendidikan di daerah. Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Pelaksanaan Komunikasi pada Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan di Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Batam - Dinas Pendidikan)".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2017) menjelaskan tentang jenis penelitian ini menjelajahi masalah dan fenomena sentral untuk kemudian dikembangkan secara merinci. Dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya untuk mendapatkan informasi secara rinci tentang penerapan komunikasi secara interpersonal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam praktik komunikasi terkait advokasi kebijakan nasional pendidikan di daerah. Adapun informan dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan 3 (tiga) SMP sasaran penelitian di Kota Batam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Advokasi pada Dinas Pendidikan Kota Batam dalam Mengimplementasikan Kebijakan Nasional Pendidikan

Advokasi kebijakan nasional pendidikan adalah inisiatif di bidang pendidikan yang berupaya memperoleh dukungan dan pengaruh dari pejabat eksekutif dan legislatif di berbagai tingkat pemerintahan. Tujuannya adalah mendukung dan mempromosikan implementasi kebijakan tertentu serta memperoleh dukungan finansial atau sumber daya lainnya untuk mencapai perubahan sesuai arahan kebijakan yang diinginkan. Khususnya terkait kebijakan merdeka belajar, advokasi ini bertujuan memastikan implementasi efektif di tingkat daerah dan sekolah, dengan harapan meningkatkan minat belajar siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan anak (Anggraini et al., 2023).

Berdasarkan Teori Kredibilitas Sumber, keberhasilan persuasi dan pengaruh pesan bergantung pada kredibilitas sumber informasi (Hovland, 2007: 270). Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota Batam menjadi sumber informasi kredibel untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan nasional pendidikan.

Implementasi advokasi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan proses kompleks namun esensial untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas. Advokasi diartikan sebagai upaya memastikan pemahaman, dukungan, dan partisipasi aktif dari pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Dalam fungsi advokasi, Dinas Pendidikan Kota Batam merancang strategi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk rapat PMO, bimbingan teknis, pendampingan, dan komunikasi persuasif. Dengan beragam strategi ini, Dinas Pendidikan Kota Batam berupaya membangun pemahaman, menciptakan dukungan, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan komitmen dan langkah-langkah strategis Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mengimplementasikan kebijakan nasional pendidikan. Rapat PMO yang berkelanjutan dapat meningkatkan kredibilitas Dinas Pendidikan sebagai sumber informasi. Langkah-langkah konkret seperti penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana prasarana membuktikan keseriusan dan kompetensi dinas dalam melaksanakan kebijakan, menciptakan citra positif dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

Pendampingan teknis, pelatihan, dan dukungan penuh kepada sekolah memberikan kontribusi positif terhadap kredibilitas sumber. Dukungan menyeluruh dari dinas menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membimbing implementasi kebijakan. Dalam kerangka Teori Kredibilitas Sumber, upaya dinas dalam mengkomunikasikan kebijakan menciptakan dasar yang kuat untuk mendapatkan dukungan dan kepatuhan dari pihak-pihak terkait.

Sosialisasi persuasif oleh Dinas Pendidikan Kota Batam menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional di daerah. Bukan hanya sarana penyampaian informasi, sosialisasi ini dirancang untuk memperoleh dukungan dan pemahaman dari berbagai pihak. Melalui pendekatan persuasif, Dinas Pendidikan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencapai pemahaman dan

dukungan luas terhadap kebijakan nasional. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, di mana kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, pendekatan persuasif menjadi kunci untuk membangun konsensus dan mengatasi potensi resistensi atau ketidakpahaman. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi efektif, terutama melalui strategi persuasif, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional di daerah.

Respon Sekolah Pada Kegiatan Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan di Daerah

Komunikasi organisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional di sekolah memiliki peran penting untuk memastikan pemahaman, partisipasi aktif seluruh stakeholder, dan mencapai tujuan pendidikan (Robbins & Judge, 2015). Menurut Littlejohn & Foss (2009), komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pandangan, dan instruksi dalam organisasi. Ini melibatkan aliran informasi dari komunikator ke komunikan dalam konteks lingkungan organisasional, dengan berbagai bentuk interaksi seperti komunikasi lisan, tertulis, dan non-verbal, yang bertujuan mencapai tujuan organisasi.

Aspek-aspek kunci dari konsep komunikasi organisasi melibatkan pemahaman pesan, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, interpretasi informasi oleh penerima, serta umpan balik untuk memastikan kesesuaian pesan dengan maksudnya. Konteks organisasional, seperti struktur hierarki, budaya perusahaan, dan norma-norma kerja, memengaruhi jalannya komunikasi (Littlejohn & Foss, 2009). Dalam konteks ini, kepemimpinan sekolah, guru, staf administratif, siswa, dan orang tua menjadi bagian integral dari jaringan komunikasi yang perlu dikelola secara efektif.

Temuan menunjukkan bahwa sekolah telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan kebijakan nasional pendidikan. Pelaksanaan Rapat Project Management Officer (PMO) secara berkelanjutan adalah salah satu tindakan yang mencolok. PMO berfungsi sebagai platform efektif untuk merumuskan, mendiskusikan, dan mengimplementasikan kebijakan di lingkungan sekolah. Keberlanjutan PMO mencerminkan keseriusan sekolah dalam menjalankan kebijakan pendidikan.

Sekolah juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang rutin diikuti. Bimtek memberikan pemahaman mendalam terkait tata cara dan strategi pelaksanaan kebijakan nasional pendidikan. Sosialisasi persuasif di lingkungan sekolah menunjukkan upaya sekolah untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada stakeholder di dalamnya, mencerminkan komitmen sekolah untuk memastikan pemahaman yang mendalam terkait kebijakan nasional.

Pendekatan Kepala Sekolah dalam menyosialisasikan dan mendiskusikan kebijakan di sekolah mencerminkan upaya yang proaktif dan partisipatif. Sosialisasi rutin menjadi wadah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh staf mengenai kebijakan pendidikan nasional dan cara implementasinya di lingkungan sekolah. Pembukaan ruang diskusi dan musyawarah memberikan kesempatan kepada guru untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan solusi terhadap tantangan atau kasus di sekolah.

Kehadiran ruang diskusi tersebut dapat menjadi forum untuk bertukar ide, pandangan, dan pengalaman antar guru, menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung implementasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, kepala sekolah tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga fasilitator dalam membangun pemahaman bersama dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh staf sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen partisipatif yang dapat meningkatkan keterlibatan seluruh anggota sekolah dalam kesuksesan implementasi kebijakan.

Pentingnya dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) juga tercermin dalam hasil penelitian. Pendampingan oleh Pemda dan fasilitas yang disediakan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi sekolah dalam implementasi kebijakan, termasuk penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana prasarana. Respons positif sekolah terhadap kebijakan nasional pendidikan juga dapat dihubungkan dengan teori penerimaan kredibilitas sumber, di mana kredibilitas sumber menjadi faktor penting dalam penerimaan kebijakan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional di tingkat sekolah. Pemahaman respon positif sekolah dapat membantu Dinas Pendidikan mengidentifikasi satuan unit pendidikan yang memerlukan lebih banyak dukungan dan pengembangan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan. Dinas Pendidikan dapat merancang strategi yang lebih terarah dan spesifik, termasuk penyelenggaraan pelatihan tambahan, pendampingan khusus, atau alokasi sumber daya yang lebih besar untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan di semua tingkatan.

Pemahaman mengenai respon positif dari sekolah-sekolah juga dapat menjadi landasan untuk pertimbangan dan penyempurnaan kebijakan nasional. Dengan mempertimbangkan pengalaman sukses dan tantangan yang dihadapi, pihak terkait dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pendidikan yang ada, sehingga dapat disesuaikan atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.



Bentuk-bentuk Komunikasi pada Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan di Daerah

Implementasi kebijakan pendidikan nasional di daerah, terutama di satuan pendidikan, membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan pemahaman dan partisipasi semua pihak terkait. Bentuk komunikasi menjadi unsur yang sangat penting dalam konteks advokasi kebijakan nasional pendidikan di daerah, di mana komunikasi dapat mengambil berbagai bentuk, baik verbal maupun non-verbal. Temuan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi verbal dan non-verbal memiliki peran krusial dalam mendukung advokasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Komunikasi kebijakan ini seringkali disampaikan secara verbal melalui pelatihan daring dan luring serta melalui platform WhatsApp. Interaksi langsung dalam pelatihan memberikan peluang untuk pertukaran informasi aktif dan diskusi antar peserta. Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara tidak langsung melalui website resmi, menciptakan dimensi non-verbal dengan menggunakan elemen visual dan teks untuk menyampaikan informasi kepada audiens yang lebih luas.

Bentuk komunikasi verbal, seperti yang terjadi melalui pelatihan daring dan luring, menciptakan ruang untuk interaksi langsung antara pihak sekolah dan pelaku pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya pertukaran informasi secara langsung (DeVito, 2018). Melalui pelatihan, guru dan tenaga pendidik dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang kebijakan nasional pendidikan.

Di era digital, platform daring seperti WhatsApp juga menjadi alat komunikasi yang efektif. WhatsApp memfasilitasi komunikasi real-time dan pertukaran informasi secara instan (Pertiwi, 2019). Penggunaan WhatsApp sebagai saluran komunikasi langsung antara pihak sekolah memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kebijakan dan memperkuat konektivitas di antara para pelaku pendidikan.

Aspek komunikasi non-verbal terwujud melalui penggunaan website resmi. Website menjadi medium untuk menyampaikan informasi kepada stakeholder pendidikan secara tidak langsung. Teori komunikasi media menyatakan bahwa media, termasuk website, memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang luas (Baran et al., 2012). Website resmi dapat menciptakan aksesibilitas informasi yang cepat dan menyeluruh.

Adanya variasi dalam pendekatan komunikasi ini menyoroti kompleksitas strategi penyampaian kebijakan, di mana penggunaan metode verbal memberikan dimensi interaktif, sementara penggunaan website menjangkau audiens secara lebih luas. Komunikasi verbal melibatkan dialog langsung, sedangkan komunikasi non-verbal melibatkan representasi visual dan penyampaian informasi tanpa melibatkan ucapan langsung. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang beragam cara media komunikasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan di tingkat pelaksanaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi upaya advokasi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dalam melaksanakan kebijakan nasional pendidikan mencerminkan dedikasi dan strategi yang terencana untuk memastikan suksesnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan Rapat Project Management Officer (PMO) yang dilakukan secara terus-menerus meningkatkan kredibilitas dinas sebagai sumber informasi. Langkah konkret seperti penguatan tata kelola, pendidikan, dan peningkatan sarana prasarana tidak hanya menunjukkan keseriusan dan kecakapan dinas, tetapi juga membentuk citra positif, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap dinas sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.

Sementara itu, sekolah telah mengambil langkah-langkah nyata dalam mengimplementasikan kebijakan nasional pendidikan. Inisiatif seperti Rapat Project Management Officer (PMO) yang diadakan secara berlanjut, partisipasi aktif dalam bimbingan teknis (bimtek), dan upaya sosialisasi persuasif telah berhasil mendorong keterlibatan pihak terkait untuk secara aktif menjalankan kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sekolah telah memainkan peran yang signifikan dan memberikan dampak positif dalam mendukung implementasi kebijakan nasional pendidikan.

Penting untuk dicatat bahwa komunikasi, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal, memegang peranan krusial dalam mendukung advokasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kedua bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi dan berkontribusi pada efektivitas dalam menyampaikan informasi serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

Disamping itu, saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Batam, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama yang erat dapat memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan meminimalisir hambatan yang mungkin muncul. Peningkatan frekuensi dan kreativitas komunikasi dalam penyampaian informasi akan membantu memastikan pemahaman yang lebih baik dari seluruh pihak terkait, sehingga implementasi



kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Memberikan perhatian khusus pada penguatan kompetensi sekolah, termasuk melalui bimbingan teknis yang lebih intensif, dapat menjadi langkah penting. Dinas Pendidikan Kota Batam diharapkan dapat lebih memberdayakan sekolah dengan memberikan dukungan yang lebih spesifik dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. D., Izza, N. C., Fajriah, A. S., Tambuala, F. H., Ningsih, A. P., Littik, S. K. A., Maria, D., & Hayati, Z. (2023). *Promosi Dan Pendidikan Kesehatan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Baraldi, C., & Corsi, G. (2017). *Education as a social system*. Springer.
- Baran, S. J., Davis, D. K., & Striby, K. (2012). *Mass communication theory: Foundations, ferment, and future*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- DeVito, J. A. (2018). *Human communication: The basic course*. Pearson.
- Hendarman, P. Z. N., & Pambudi, A. R. (2020). *Mewujudkan Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Pusat dan Daerah Berorientasi Quality Spending Menggunakan Neraca Pendidikan Daerah*. 95.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). *Educational administration: Theory, research, and practice* (Ninth Edit). McGraw Hill.
- Indra, R. (2011). *Respons Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Implementasi Penjaminan Mutu Pada Tingkat Satuan Pendidikan: Survei Terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binjai, Sumatera Utara*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rizky, U. F. (2015). Kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas (Studi tentang advokasi kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya). *Indonesian Journal of Disability Studies*, 2(1), 30–37.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Organizational behavior: Emerging knowledge, global reality*. Edinburgh Gate, England: Pearson Education Limited.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Susanto, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.